

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DI DESA MAMPARI KECAMATAN BATU MANDI KABUPATEN BALANGAN

Susiani

Ilmu Administrasi Negara/Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Email: hjsusiani1961@gmail.com

Abstract

Developing the capacity of village government apparatus is very important to improve the quality of service, efficiency, and effectiveness of village management, as well as improve the ability to face challenges and manage village development. The purpose of this study was to determine the Capacity Development of Village Government Apparatus in Mampari Village, Batu Mandi District, Balangan Regency. The research method used is descriptive qualitative with interview data collection techniques, the sources in this study were 5 (five) people consisting of the Village Head, Village Secretary, Treasurer, Head of Development and Village Assistant. The observation related to the development of the capacity of village apparatus was carried out for 3 (three) months. The data analysis used was an interactive model with stages of data collection, data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The results of the study showed that the development of the capacity of village government apparatus in Mampari Village with a four-pillar approach, namely strengthening knowledge, skills, and attitudes; strengthening training systems and procedures; strengthening organizations and institutions; and strengthening information and coordination systems, can be concluded to have been implemented quite well. The capacity development that has been carried out by the Mampari Village Government has been able to improve the performance of village government apparatus in managing the village. However, there needs to be an increase in the budget for the provision of training and workshops, improvement of the information technology system so that coordination can be carried out properly between village officials, and improvement of periodic evaluation and monitoring so that the capacity of village officials can be developed effectively.

Keywords: *Development, Capacity, Village Apparatus.*

Abstrak

Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan desa, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan mengelola pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Pembangunan dan Pendamping Desa. Adapun observasi terkait pengembangan kapasitas aparatur desa dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan

tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa di Desa Mampari dengan pendekatan empat pilar, yaitu penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap; penguatan sistem dan prosedur pelatihan; penguatan organisasi dan kelembagaan; dan penguatan sistem informasi dan koordinasi, dapat disimpulkan terlaksana cukup baik. Pengembangan kapasitas yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Mampari mampu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola desa. Namun perlu adanya peningkatan anggaran untuk pengadaan pelatihan dan workshop, peningkatan sistem informasi teknologi agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik antar aparatur desa, dan peningkatan evaluasi serta monitoring berkala agar kapasitas aparatur desa dapat dikembangkan secara efektif.

Kata kunci: Pengembangan, Kapasitas, Aparatur Desa

PENDAHULUAN

Otonomi desa memiliki tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kelemahan desa dalam membangun pelayanan publik berkualitas diantaranya adalah gagap teknologi, kurang disiplinnya para aparatur pemerintah desa, minim pengetahuan serta jam kerja yang tidak terstandar. Hal pentingnya adalah pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dapat menjadi solusi utama.

Pengembangan kapasitas aparatur desa adalah langkah penting untuk mencapai pembangunan yang merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan adalah pengembangan sumber daya manusia yang berkreasi melalui pendidikan dan pelatihan suatu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia baik ditingkat pengetahuan, peningkatan keahlian pengetahuan keterampilan pada pemerintah desa.

Pada umumnya setiap pemerintah desa dalam kegiatan operasinya mengemukakan beberapa sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan pemerintah desa sangat menentukan dalam setiap organisasi pemerintahan, sebab aparatur pemerintah desa merupakan tulang punggung pemerintahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Akan tetapi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya masih banyak mengalami kendala karena aparatur pemerintah desa memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan tempat bekerjanya. Sehingga berdampak bagi pemerintah desa tersebut. Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk mewujudkan pemerintah desa yang baik diperlukan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa maupun dalam pembangunan. Untuk menghadapi tantangan tersebut maka salah satu upaya aparatur pemerintah desa yaitu meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan (Nikodimus, 2022).

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat menciptakan sumber daya aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan pada perjuangan Bangsa dan Negara, semangat persatuan dan kesatuan, dan pengembangan wawasan Aparatur pemerintah desa.

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa diharapkan dapat mewujudkan atau menciptakan aparatur pemerintah desa yang profesional yang mencakup peningkatan pengetahuan, peningkatan keahlian dan keterampilan, serta perubahan sikap; peningkatan sistem dan prosedur pelatihan; peningkatan organisasi dan kelembagaan; dan peningkatan sistem informasi serta koordinasi.

Kondisi saat ini, pada penyelenggaraan pemerintah desa masih menghadapi sejumlah

tantangan dan kendala. Terutama pemerintah daerah untuk harus turut mendampingi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejumlah kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini diantaranya yaitu masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah desa serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Penelitian ini mendukung agenda pemberdayaan desa yang saat ini menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai desa. Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan aparatur desa yang berdampak secara langsung pada pengelolaan pemerintah desa. Permasalahan keterbatasan anggaran dalam pengembangan kapasitas dan letak Pemerintah Desa Mampari yang berada pada lokasi desa kategori terdalam, sehingga seringkali menyebabkan keterlambatan informasi yang diterima berdampak pada pengembangan aparatur Desa Mampari. Berbeda dengan penelitian (Nikodimus, 2022) yang berfokus fenomena ketidaksesuaian antara kemampuan dengan beban kerja sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas untuk mendukung kinerja aparatur desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *"Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan"*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Studi kasus penting digunakan dalam penelitian ini Mengapa studi kasus penting digunakan? karena merupakan sebuah cara dimana tujuan dari sebuah program dan keadaan khusus implementasinya dapat diperiksa dan di dokumentasikan dengan sangat rinci dari waktu ke waktu. Kasus yang diteliti pada pengembangan aparatur

desa Pemerintah Desa Mampari menunjukkan bahwa pengembangan yang sudah dilakukan memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian studi kasus ini mewakili pandangan yang jauh lebih luas dimana penyelidikan empiris atas fenomena kontemporer dalam konteks alaminya menggunakan berbagai sumber bukti dan informasi termasuk data sekunder, wawancara, observasi serta pengalaman (Sugiyono, 2014). Metode penelitian ini relevan untuk digunakan karena menggambarkan keadaan objek dan subjek yang ada pada masa sekarang berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian (Huberman, 2014).

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yaitu dengan cara menyusun pertanyaan secara rinci yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai upaya pengembangan kapasitas aparatur Desa Mampari. Jumlah narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas: Kepala Desa Mampari, Sekretaris Desa Mampari, Bendahara Desa Mampari, Kaur Pembangunan Desa Mampari dan Pendamping Desa. Selain itu, adapun sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan data dokumentasi yaitu: Dokumen Profil Pemerintah Desa Mampari. Pada penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive dimana peneliti berusaha mencari informan yang dapat dipercaya dan mengetahui informasi terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur desa di Kantor Desa Mampari.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mendapatkan jawaban dan menghasilkan informasi yang jelas, serta dapat menggambarkan informasi yang sesungguhnya terjadi di dalam ruang interaksi terkait dengan pengembangan kapasitas aparatur Desa Mampari. Sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif (Huberman, 2014) yang digunakan melalui tahapan 1). Pengumpulan Data, pada tahapan ini data yang dikumpulkan melalui wawancara dan

dokumentasi secara langsung ke lokasi penelitian. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber terkait a). penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap, b). Penguatan sistem dan prosedur pelatihan, c). penguatan organisasi dan kelembagaan dan d). penguatan sistem informasi dan koordinasi. Dokumentasi yang dikumpulkan terkait profil Pemerintah Desa Mampari. Setelah data primer dan sekunder telah terkumpul, selanjutnya melakukan tahapan 2). Reduksi Data, pada tahapan ini data yang sudah dikumpulkan diseleksi kembali untuk dilakukan pemilihan antara data yang terkait langsung dengan penelitian dan data yang tidak perlu dimasukkan kedalam penelitian, setelah reduksi data maka tahapan selanjutnya 3). Penyajian Data, pada tahapan ini adalah penyajian data sekunder dan data primer. Data hasil wawancara terhadap para narasumber yang sudah direduksi disajikan pada temuan dan hasil penelitian, selanjutnya adalah 4). Penarikan simpulan dilakukan mulai dari menarik kesimpulan hasil wawancara dari para narasumber dilakukan dengan cara membandingkan jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan, sehingga berdasarkan perbandingan tersebut maka dapat diketahui kesimpulan dari pengembangan kapasitas aparatur yang sudah dilakukan di Pemerintah Desa Mampari. melalui dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kapasitas aparatur desa dapat dilakukan melalui diklat dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur desa yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terukur, terstandar, yang berkelanjutan di seluruh desa wilayah NKRI (Labola, 2019).

Pengembangan kapasitas aparatur desa dapat diukur melalui empat pilar yaitu penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap; penguatan sistem dan prosedur pelatihan; penguatan organisasi dan kelembagaan; dan penguatan sistem informasi dan koordinasi (Labola, 2019). Berikut adalah hasil penelitian

dan pembahasan melalui 4 pilar pengembangan kapasitas aparatur desa.

1. Penguatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap

Wawancara pertama ditujukan kepada Kepala Desa Mampari, mengatakan:

"Kami telah melakukan pelatihan untuk aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa, pelatihan untuk aparatur desa dilakukan secara bergantian dan sesuai tingkat kebutuhan hal tersebut dikarenakan sumber dana yang terbatas. Pelatihan yang didapatkan oleh para aparatur biasanya diselenggarakan oleh dinas bidang pemberdayaan masyarakat desa. Adapun pelatihan lainnya yang dilakukan secara bergantian adalah pelatihan yang direncanakan dan di anggarkan oleh desa sendiri".

Wawancara kedua ditujukan kepada Sekretaris Desa Mampari, mengatakan:

"Ada 2 hal terkait ini. Yang pertama kami mendapatkan pelatihan, maksudnya pelatihan tersebut sudah terjadwal oleh pemerintah daerah. Dalam 1 tahun kami pasti mendapatkan kesempatan untuk dijadwalkan mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua kami memberikan pelatihan untuk aparatur desa kami yang memang memerlukan pelatihan, dalam hal ini kami biasanya didampingi oleh pendamping desa."

Wawancara ketiga ditujukan kepada Bendahara Desa Mampari, mengatakan:

"Saya lebih sering mendapatkan pelatihan dibanding dengan rekan lainnya. Pelatihan yang saya dapatkan tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya, karena pengelolaan keuangan desa saat ini menggunakan aplikasi sehingga memerlukan pembelajaran untuk menggunakan atau mengoperasikan aplikasi keuangan tersebut."

Wawancara keempat ditujukan kepada Kaur Pembangunan Desa Mampari, mengatakan:

"Penguatan pengetahuan dan keterampilan yang sering saya dapatkan adalah pelatihan tentang perencanaan pembangunan desa, pelatihan ini sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam membantu kepala desa merencanakan pembangunan desa."

Wawancara kelima ditujukan kepada Pendamping Desa Mampari, mengatakan:

"Sebagai pendamping desa yang diantaranya mendampingi desa mampari, saya melihat desa ini mempunyai usaha yang cukup baik dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur desanya, dalam mengelola sistem pemerintahan. Namun memang karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh desa mampari, maka mereka harus betul-betul memprioritaskan aparatur yang tidak mendapatkan pelatihan dari pemerintah, untuk diberikan pelatihan secara mandiri yang dibiayai oleh desa."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap pada aparatur Desa Mampari dilakukan melalui pelatihan dan workshop, kegiatan tersebut terbukti telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan pemerintah desa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Desa Mampari, seperti terbatasnya anggaran sehingga desa harus memberikan prioritas untuk aparatur yang harus mendapatkan pelatihan.

Keterbatasan anggaran dapat memiliki dampak signifikan pada pengembangan kapasitas aparatur desa dalam aspek penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap (Labola, 2019). Dampak pada pengetahuan yang akan dirasakan adalah 1). Keterbatasan akses pelatihan, keterbatasan anggaran dapat membatasi akses aparatur desa ke pelatihan dan workshop yang berkualitas, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka; 2). Kurangnya sumber

daya, keterbatasan anggaran dapat menyebabkan kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur desa. Dampak pada keterampilan adalah 1). Keterbatasan kesempatan praktik, keterbatasan anggaran dapat membatasi kesempatan aparatur desa untuk mempraktikkan keterampilan mereka, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan kemampuan mereka; 2). Kurangnya umpan balik, keterbatasan anggaran dapat menyebabkan kurangnya umpan balik yang konstruktif, sehingga aparatur desa tidak dapat mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Dampak pada sikap adalah: 1). Kurangnya motivasi: Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan kurangnya motivasi aparatur desa untuk meningkatkan sikap dan kemampuan mereka, karena mereka merasa bahwa investasi pada pengembangan diri tidak akan dihargai; 2). Kurangnya kepercayaan diri: Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri aparatur desa, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan sikap dan kemampuan mereka (Labola, 2019).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh (Fajarwati, 2019), dalam penelitiannya menunjukkan permasalahan terbatasnya anggaran merupakan hal yang menghambat dalam peningkatan kualitas aparatur desa. Minimnya anggaran memberikan efek pada program dan kegiatan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa tidak dapat terealisasi. Terkait hal tersebut diharapkan perlunya kerja sama dan perhatian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar melakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas pemerintah desa.

2. Penguatan Sistem dan Prosedur Pelatihan

Wawancara pertama ditujukan kepada Kepala Desa Mampari, mengatakan:

"Desa kami sudah membentuk dan memiliki sistem pelatihan yang baik, namun saya rasa perlu adanya peningkatan lagi, agar aparatur desa kami memiliki keterampilan yang memadai dan sama dengan aparatur pada desa lainnya. Penguatan prosedur kami adalah dengan melihat tingkat prioritas pelatihan yang diperlukan."

Wawancara kedua ditujukan kepada Sekretaris Desa Mampari, mengatakan:

"Sistem dan prosedur pelatihan kami sudah baik, namun perlu dilakukan peningkatan lagi untuk aparatur desa agar memiliki keterampilan yang memadai dan sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Pada usaha penguatan sistem dan prosedur kami biasa mendapatkan informasi secara langsung baik itu dari pendamping desa maupun dari rekanan lainnya di desa ataupun rekanan dari desa lain."

Wawancara ketiga ditujukan kepada Bendahara Desa Mampari, mengatakan:

"Sistem dan prosedur yang ada di desa ini sudah baik, namun perlu ditingkatkan."

Wawancara keempat ditujukan kepada Kaur Pembangunan Desa Mampari, mengatakan:

"Sistem pelatihan kami sudah cukup baik, akan tetapi perlu adanya peningkatan lagi untuk memastikan aparatur desa memiliki keterampilan yang memadai, baik itu yang bermanfaat didalam pemerintahan desa maupun diluar yaitu bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat."

Wawancara kelima ditujukan kepada Pendamping Desa Mampari, mengatakan:

"Yang saya lihat sistem dan prosedur yang digunakan sudah cukup baik, adapun peningkatan yang perlu dilakukan adalah frekuensi pelatihan harus lebih banyak dilakukan baik pelatihan dari dinas pemberdayaan maupun mandiri."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sistem pelatihan dan prosedur pelatihan aparatur Desa Mampari desa sudah baik. Namun perlu ditingkatkan lagi untuk memastikan aparatur desa memiliki keterampilan yang memadai. Pelatihan diharapkan lebih sering dilakukan untuk menambah keterampilan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

Sistem dan prosedur pelatihan aparatur desa yang belum memadai dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja

dan kemampuan aparatur desa (Labola, 2019). Dampak pada kinerja aparatur desa: 1). Kinerja yang tidak optimal: Sistem dan prosedur pelatihan yang belum memadai dapat menyebabkan aparatur desa tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif; 2). Kesalahan dalam pengambilan keputusan: Kurangnya pelatihan yang memadai dapat menyebabkan aparatur desa membuat keputusan yang tidak tepat, yang dapat berdampak negatif pada masyarakat desa. Dampak pada kemampuan aparatur desa: 1) Kurangnya kemampuan teknis: Sistem dan prosedur pelatihan yang belum memadai dapat menyebabkan aparatur desa tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. 2). Kurangnya kemampuan manajerial: Kurangnya pelatihan yang memadai dapat menyebabkan aparatur desa tidak memiliki kemampuan manajerial yang cukup untuk mengelola sumber daya desa.

Harapan adanya peningkatan sistem dan prosedur pelatihan pada Pemerintah Desa Mampari ini perlu untuk diperhatikan, dalam (Setyo Nugroho; Andi Fefta Wijaya; Moh. Said, 2014) menunjukkan ada upaya mewujudkan aparatur desa yang mampu melaksanakan pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip good governance, BBPMD Malang melakukan berbagai pelatihan yang didukung dengan perbaikan dan peningkatan modul pelatihan serta pemantapan materi melalui studi lapang. Dengan semakin meningkatnya kualitas peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan di BBPMD Malang diharapkan aparatur pemerintah desa mampu untuk mewujudkan good governance di daerahnya masing-masing.

3. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan
Wawancara pertama ditujukan kepada Kepala Desa Mampari, mengatakan:

Desa kami tentunya sudah membuat struktur organisasi yang jelas sesuai dengan arahan dan pendampingan oleh pemerintah kabupaten balangan, struktur organisasi yang ada di desa kami sudah dilengkapi peran dan tanggung jawab masing-masing aparatur desa. Hal tersebut kami lakukan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja."

Wawancara kedua ditujukan kepada Sekretaris Desa Mampari, mengatakan:

"Struktur organisasi kami sudah jelas. Adapun dalam hal peraturan dan prosedur terkait aparatur desa juga jelas dan terstruktur. Hanya saja beberapa peraturan dan prosedur terkait pelayanan yang kami berikan kepada publik atau masyarakat perlu adanya pembaharuan sesuai aturan yang berlaku saat ini."

Wawancara ketiga ditujukan kepada Bendahara Desa Mampari, mengatakan:

"Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, kami mengupayakan pengelolaan kelembagaan desa yang transparan dan akuntabel."

Wawancara keempat ditujukan kepada Kaur Pembangunan Desa Mampari, mengatakan:

"Sudah cukup baik, pembagian tugas dan tanggung jawab sudah sesuai dengan porsinya masing-masing."

Wawancara kelima ditujukan kepada Pendamping Desa Mampari, mengatakan:

"Dalam hal ini saya menilai, penguatan organisasi dan kelembagaan yang dilakukan sudah baik, namun perlu adanya ukuran penilaian yang lebih akurat untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja."

Hasil penelitian menunjukkan aspek organisasi dan kelembagaan aparatur sudah jelas, namun perlu adanya parameter yang lebih akurat untuk memastikan tingkat efisiensi dan efektivitas kerja. Peraturan dan prosedur terkait pelayanan untuk masyarakat perlu untuk ditinjau atau diperbaharui kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika tidak adanya parameter dalam pengembangan organisasi dan kelembagaan dapat memiliki dampak signifikan pada efektivitas dan efisiensi organisasi (Labola, 2019). Dampak pada efektivitas organisasi: 1). Kurangnya arah dan tujuan: tanpa

parameter yang jelas, organisasi dapat kehilangan arah dan tujuan, sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 2). Kurangnya standar kualitas: tanpa parameter yang jelas, organisasi dapat kesulitan dalam menentukan standar kualitas yang harus dicapai. Dampak pada efisiensi organisasi: 1). Pemborosan sumber daya: tanpa parameter yang jelas, organisasi dapat mengalami pemborosan sumber daya, karena tidak ada standar yang jelas untuk mengukur efisiensi; 2). Kurangnya akuntabilitas: tanpa parameter yang jelas, organisasi dapat kesulitan dalam menentukan akuntabilitas dan tanggung jawab. Dampak pada kinerja organisasi: 1). Kinerja yang tidak optimal: tanpa parameter yang jelas, organisasi dapat mengalami kinerja yang tidak optimal, karena tidak ada standar yang jelas untuk mengukur keberhasilan; 2). Kurangnya motivasi: tanpa parameter yang jelas, organisasi dapat mengalami kurangnya motivasi, karena tidak ada standar yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Dampak pada pengambilan keputusan: 1). Keputusan yang tidak tepat: tanpa parameter yang jelas, organisasi dapat membuat keputusan yang tidak tepat, karena tidak ada standar yang jelas untuk mengukur keberhasilan; 2). Kurangnya transparansi: tanpa parameter yang jelas, organisasi dapat kesulitan dalam menentukan transparansi dan keterbukaan.

Penelitian oleh (Hapsari, 2021) berpedoman pada regulasi yang ada dan selalu berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah yang ada di atas pemerintah desa memberikan peningkatan terhadap efektifitas kinerja aparatur desa. Meskipun pemerintah Desa Mampari sudah memiliki organisasi dan kelembagaan yang jelas, namun parameter yang lebih akurat dan terkini sangat perlu untuk diterapkan agar efisiensi dan efektifitas aparatur desa lebih terjamin.

4. Penguatan Sistem Informasi dan Koordinasi

Pada aspek sistem informasi dan koordinasi aparatur Desa Mampari, dalam hal internal sudah baik, namun jaringan internet yang tidak stabil menjadi permasalahan utama terlambatnya beberapa informasi yang diterima pemerintah desa, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih sering dengan

pendamping desa untuk memastikan informasi-informasi luar terkait pemerintah desa agar dapat diterima tepat waktu dan akurat.

Sistem informasi dan koordinasi yang buruk dapat memiliki dampak signifikan pada pengembangan sistem informasi dan koordinasi aparatur desa (Labola, 2019). Dampak pada sistem informasi: 1). Keterlambatan akses informasi: Jaringan internet yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan akses informasi, sehingga aparatur desa kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan; 2). Kesalahan data: jaringan sistem informasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahan data, karena data yang dikirimkan atau diterima tidak lengkap atau tidak akurat. Dampak pada koordinasi: 1. keterlambatan komunikasi: jaringan informasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan komunikasi antara aparatur desa, sehingga koordinasi menjadi tidak efektif; 2). Kesulitan dalam berbagi informasi: jaringan informasi yang buruk dapat menyebabkan kesulitan dalam berbagi informasi antara aparatur desa, sehingga koordinasi menjadi tidak efektif. Dampak pada pelayanan publik: 1). Pelayanan yang tidak efektif: jaringan informasi yang buruk dapat menyebabkan pelayanan publik yang tidak efektif, karena aparatur desa kesulitan dalam mengakses informasi dan berkoordinasi; 2). Kurangnya transparansi: jaringan informasi yang buruk dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam pelayanan publik, karena informasi tidak dapat diakses dengan mudah. Dampak pada pengembangan desa: 1). Keterlambatan pembangunan: jaringan informasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan pembangunan desa, karena aparatur desa kesulitan dalam mengakses informasi dan berkoordinasi; 2). Kurangnya inovasi: jaringan informasi yang buruk dapat menyebabkan kurangnya inovasi dalam pembangunan desa, karena aparatur desa kesulitan dalam mengakses informasi dan teknologi baru.

Penelitian (Isnaini Rodiyah; Hendra Sukmana; Ilmi Usrotin Choiriyah, 2021) dalam hal kemampuan berkomunikasi para aparatur desa perlu untuk ditingkatkan lagi agar tercipta suasana iklim kerja yang kondusif dalam penyelenggaraan

pemerintah, terkait penggunaan teknologi informasi oleh aparatur desa tidak memiliki ketertarikan terhadap pelatihan sistem informasi jaringan hal ini disebabkan walaupun aparatur menerima pelatihan namun sulit untuk diaplikasikan karena ketidakstabilan jaringan internet. Meskipun demikian pemerintah desa terus berupaya untuk tetap meningkatkan pengetahuan dan pemahaman IT aparatur desa dengan mengadakan atau mengikutsertakan ada pelatihan-pelatihan. Penelitian tersebut memiliki permasalahan yang serupa dengan pemerintah Desa Mampari pada aspek lemahnya sistem informasi. Pemerintah Desa Mampari berharap pemerintah ditingkat atas mampu memberikan solusi atas ketidakstabilan jaringan internet seperti pemasangan jaringan internet dengan sinyal yang kuat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa di Desa Mampari dengan pendekatan empat pilar, yaitu penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap; penguatan sistem dan prosedur pelatihan; penguatan organisasi dan kelembagaan; dan penguatan sistem informasi dan koordinasi, dapat disimpulkan terlaksana cukup baik. Pengembangan kapasitas yang dilakukan mampu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola desa. Namun perlu adanya peningkatan yang dilakukan terus menerus dibawah binaan pemerintah daerah agar kapasitas aparatur Pemerintah Desa Mampari mampu dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajarwati, N. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22(2). <https://doi.org/10.31845/jwk.v22i1.165>
- Hapsari, R. A. (2021). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa

- Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
<https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.8385>
- Huberman, M. B. M. dan A. M. (2014). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. In *Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)*.
- Isnaini Rodiyah; Hendra Sukmana; Ilmi Usrotin Choiriyah. (2021). Pengembangan Kapasitas Sdm Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Urnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 32–41.
- Labola, Y. A. (2019). Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Bakat dan Ketahanan dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(1).
<https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2760>
- Nikodimus. (2022). Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Desan. *Fokus*, 20(1), 127–131.
- Setyo Nugroho; Andi Fefta Wijaya; Moh. Said. (2014). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (studi pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 1010–1015.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.